

**TESIS**

**KOLABORASI PEMERINTAHAN (COLLABORATIVE GOVERNANCE)  
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SOPPENG**

**IIN SARTINI**

**E062201007**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KOLABORASI PEMERINTAHAN (COLLABORATIVE GOVERNANCE)  
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SOPPENG**

Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh :

**IIN SARTINI**

**E062201007**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**KOLABORASI PEMERINTAHAN (COLLABORATIVE GOVERNANCE)  
DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SOPPENG**

Disusun dan diajukan oleh

**IIN SARTINI**

E062201007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **29 Agustus 2023**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.  
Nip. 19630921 198202 2 001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si.  
Nip. 19680411 200012 1 001

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan,

Dr. A. M. Rusli, M.Si.  
Nip. 19650713 200112 1 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP, M. Si.  
Nip. 19750818 200801 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : lin Sartini

NIM : E062201007

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Agustus 2023



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang mengambil judul **“Kolaborasi Pemerintahan (Collaborative Governance) Dalam Penanganan Covid-19 DI Kabupaten Soppeng”**. Tujuan penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister bagi mahasiswa program S-2 di program magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi suami tercinta Muhtadi, yang setia mendoakan dan mendampingi penulis baik suka maupun duka dalam proses penyusunan tesis ini. Juga kepada kedua malaikat kecil kami, ananda Ameera Syauqiyah Muhtadi dan ananda Muhammad Rayees Arshaka Muhtadi yang menjadi pelipur lara penulis sampai terselesaikannya tesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sedalam dalamnya

kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Dra. Hj. Murni Mori, M.Si dan Ayahanda Almarhum H. Buhari, S.Sos yang telah memberikan cinta dan kasihnya serta memberikan nasihat dan dukungan selama penulis menjalankan studi hingga saat ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Prof.Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Prof.Dr. Phil Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Dr. A.M.Rusli, M.Si, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.si, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang selalu memberi bimbingan, arahan, saran, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini. Semoga dengan apa yang diberikan menjadikan tesis ini lebih bermanfaat bagi masyarakat dan kepastakaan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.
5. Kepada tim penguji, Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si., Dr. H. A. M Rusli, M.Si, Dr.A.Lukman Irwan, S.IP., M.Si. Terima kasih telah menjadi

- penguji dan dosen yang senantiasa memberikan saran kepada penulis
6. Seluruh dosen pascasarjana, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Bapak Dr. H. A.M.Rusli, M.Si, Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si, Ibu Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Bapak Dr. H.Suhardiman Syamsu, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin;
  7. Para pegawai dan staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuannya kepada penulis;
  8. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Forkopimda Kabupaten Soppeng dan masyarakat Kab. Soppeng yang turut serta membantu demi kelancaran penelitian dan penulisan tesis
  9. Seluruh rumpun keluarga penulis dimanapun berada yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu melalui dukungan moril dan materil.
  10. Saudara seperjuangan magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2020, Nurul Mawahda, A. Rewo Batari Wanti, Ulfa Dzakiah, Wahyuddin Halik, Suhardiansyah, A. Ferian Mahaputra dan Arya Utama. Terima kasih atas kebersamaan dan support yang diberikan kepada penulis.
  11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan tesis ini.

Akhirnya, penulis telah berupaya dengan maksimal dalam menyelesaikan tesis ini, namun lagi-lagi penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun dari tata bahasa. Kiranya tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti hal yang sama.

Sekian dan Terima Kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Agustus 2023

lin Sartini



## ABSTRAK

**lin Sartini**, NIM E062201007. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin dengan judul Kolaborasi Pemerintahan (Collaborative Governance) dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Soppeng, Dibawah bimbingan Nurlinah dan Suhardiman Syamsu.

Penelitian ini menyoroti 4 aspek utama dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Soppeng. yaitu Aspek kelembagaan, hubungan saling ketergantungan antarorganisasi yang menjadi kunci penting dalam menciptakan kolaborasi yang efektif, Komunikasi dan Koordinasi, dan pentingnya pertukaran sumber daya dalam upaya mengatasi COVID-19. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada berbagai informan dan pengumpulan dokumen terkait.

Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan covid melibatkan tatanan kelembagaan secara nasional dimana pemerintah daerah memiliki hak otonom untuk membentuk kelembagaan lokal. hubungan saling ketergantungan memungkinkan pertukaran sumber daya yang efisien dan informasi yang cepat antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat sipil sehingga kepercayaan yang terjalin melalui komunikasi dan koordinasi yang intens antar organisasi dapat menciptakan lingkungan yang terbuka dan transparan, memperkuat aksi kolektif dalam mengatasi ketimpangan dalam penanganan pandemic sementara itu pertukaran sumber daya yang efektif menciptakan sinergi yang kuat, meningkatkan efisiensi, dan memperluas dampak positif upaya bersama. Namun, sumber daya yang cenderung terkonsentrasi pada pemerintah daerah membuatnya menjadi aktor utama dalam kolaborasi, sehingga organisasi lain mengandalkan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah

Kata Kunci; Kolaborasi Pemerintahan, Pertukaran Sumber Daya, Penanganan bencana

## **ABSTRACT**

**lin Sartini**, NIM E062201007 Government Science Masters Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University with the title Collaborative Governance in Handling Covid-19 in Soppeng Regency. Under the guidance of Nurlinah and Suhardiman Syamsu.

This research highlights 4 main aspects of handling COVID-19 in Soppeng Regency. namely the institutional aspect, interdependence between organizations which is an important key in creating effective collaboration, communication and coordination, and the importance of exchanging resources in efforts to overcome COVID-19. Data collection was carried out by conducting in-depth interviews with various informants and collecting related documents.

The results show that handling Covid involves a national institutional order in which local governments have the autonomous right to form local institutions. interdependence relationships enable the efficient exchange of resources and rapid information between local governments, health institutions, the private sector, and civil society so that trust is built through intense communication and coordination between organizations can create an open and transparent environment, strengthening collective action in addressing inequalities in handling the pandemic while effective exchange of resources creates strong synergies, improves efficiency, and expands the positive impact of joint efforts. However, the resources that tend to be concentrated in local governments make them the main actors in collaboration, so that other organizations rely on resources provided by the government

Keywords; Government Collaboration, Resource Exchange, Disaster Management

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	29
1.3. Tujuan penelitian.....	32
1.4. Manfaat Penelitian .....	32
BAB II.....	34
TINJAUAN PUSTAKA.....	34
2.1. Konsep Dasar dan Definisi Collaborative.....	34
2.2. Governance.....	37
2.3. Collaborative Governance .....	38
2.4. Konsep Kolaborasi Integratif.....	41
2.5. Penelitian Terdahulu .....	52
2.6. Kerangka Pikir.....	54
BAB III.....	56
METODE PENELITIAN .....	56
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
3.2. Lokasi Penelitian.....	56
3.3. Fokus Penelitian .....	56
3.4. Sumber Data .....	58
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	58
3.6. Teknik analisis Data .....	60
3.7. Pengecekan Validitas Temuan .....	62
BAB IV.....	65

GAMBARAN UMUM LOKASI PENEITIAN.....	65
4.1    Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
4.1.1    Gambaran Umum Kabupaten Soppeng .....	65
4.2. Visi Misi Kabupaten Soppeng.....	68
4.3. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Soppeng .....	69
4.4. Tujuan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Soppeng .....	70
4.5. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Soppeng .....	70
BAB V.....	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73
5.1. HASIL PENELITIAN .....	73
5.1.1. Kelembagaan Dan Kebijakan .....	73
5.1.2.    Hubungan Interorganisasi .....	115
5.1.3.    Komunikasi Dan Koordinasi .....	135
5.1.4.    Pertukaran Sumber Daya .....	153
BAB VI.....	170
PENUTUP .....	170
6.1.    KESIMPULAN .....	170
6.2.    SARAN.....	172
DAFTAR PUSTAKA .....	175
LAMPIRAN .....	177

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Perbandingan Kasus Covid-19 antara Kabupaten Soppeng, Wajo, Bone dan Barru	11
<b>Tabel 2.</b> Perbandingan Sumber Daya Kesehatan antara Kabupaten Soppeng, Bone Wajo dan Barru	12
<b>Tabel 3.</b> Penelitian Terdahulu	47
<b>Tabel 4.</b> Jumlah Penduduk Perdesa/ kelurahan se Kabupaten Soppeng	58
<b>Tabel 5.</b> Daftar Aktor yang terlibat dalam penanganan Covid-19 Di Kabupaten Soppeng	123

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian	49
Gambar 2. Struktur Organisasi Satgas Penanganan Covid di Daerah	69
Gambar 3. Perbup Komite Penanganan Covid	71
Gambar 4. Sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan covid-19	74
Gambar 5. Pertemuan rutin penanganan covid 19	80
Gambar 6. Komunikasi dan penyebaran informasi melalui media	82
Gambar 7. Pelibatan stakeholder dalam penanganan covid 19	83
Gambar 8. Rapat koordinasi antar perangkat pemerintah daerah	97
Gambar 9. Komunikasi dan penyebaran informasi melalui media	123







## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pandemi COVID-19, disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019, telah menjadi salah satu krisis kesehatan global paling serius dalam sejarah baru-baru ini. Penyebaran yang cepat dan luas virus ini menghasilkan pandemi yang meluas ke hampir seluruh negara di dunia. Seiring berjalannya waktu, virus ini menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mempengaruhi jutaan orang dan mengubah cara hidup masyarakat di seluruh penjuru dunia.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat global tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menyebabkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Secara kesehatan, virus ini menyebabkan spektrum penyakit mulai dari gejala ringan hingga parah, bahkan kematian. Peningkatan angka kasus dan kematian yang cepat menyebabkan kekurangan fasilitas kesehatan, sumber daya medis, dan tenaga medis yang cukup untuk merawat pasien COVID-19.

Dari segi sosial, pandemi ini telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat secara drastis. Tindakan pembatasan sosial dan lockdown di banyak negara telah mengakibatkan isolasi sosial,

pembatalan acara besar, penutupan sekolah, dan perubahan besar dalam interaksi sosial. Hal ini juga memberikan dampak psikologis, termasuk meningkatnya tingkat kecemasan, depresi, dan stres pada individu.

Secara ekonomi, pandemi COVID-19 telah memicu krisis ekonomi global yang signifikan. Penutupan bisnis, perusahaan yang bangkrut, dan pemutusan hubungan kerja massal telah menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan pendapatan, dan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan. Sektor pariwisata, perhotelan, penerbangan, dan industri lainnya juga terpukul parah, mengakibatkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya.

Dalam konteks politik, pandemi ini menuntut respons cepat dan tegas dari pemerintah di seluruh dunia. Pemerintah di berbagai negara menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan yang sulit terkait kebijakan kesehatan masyarakat, penanganan karantina, pembatasan pergerakan, dan penutupan perbatasan. Beberapa negara mengalami ketegangan politik dalam mengelola pandemi dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa di seluruh dunia. Secara sosial, langkah-langkah pembatasan sosial yang diambil oleh pemerintah, seperti lockdown dan karantina, telah mengubah cara hidup masyarakat secara drastis. Pembatasan ini mengakibatkan isolasi sosial, penutupan sekolah,

pembatalan acara publik, dan pembatasan pergerakan. Dampaknya terasa pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental, dengan meningkatnya tingkat kecemasan, stres, dan depresi akibat ketidakpastian dan kejenuhan yang dialami oleh individu. Selain itu, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu dampak sosial yang mengkhawatirkan. Secara ekonomi, pandemi ini telah menyebabkan guncangan hebat pada perekonomian global. Penutupan bisnis, penurunan permintaan, dan ketidakpastian ekonomi menyebabkan kerugian yang signifikan pada sektor bisnis, terutama pada industri perhotelan, restoran, transportasi, dan pariwisata. Banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja massal, meningkatkan tingkat pengangguran secara drastis. Pekerja yang terdampak juga menghadapi kesulitan dalam mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, sektor informal dan pekerja mandiri juga terkena dampak yang serius, karena mereka sering kali tidak memiliki jaminan sosial atau perlindungan ketenagakerjaan. Di samping itu, ketimpangan ekonomi juga semakin terlihat selama pandemi. Masyarakat yang sudah rentan seperti pekerja migran, pekerja informal, dan kelompok berpendapatan rendah menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar. Di beberapa negara, dampak sosial dan ekonomi pandemi ini juga telah memicu gelombang migrasi internal dan meningkatnya angka kemiskinan.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Secara sosial, langkah-langkah pembatasan sosial

seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) telah mengubah cara hidup masyarakat. Penutupan sekolah, pembatalan acara publik, serta anjuran untuk bekerja dan belajar dari rumah telah mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan isolasi sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat peningkatan signifikan dalam tingkat kecemasan dan stres di antara masyarakat Indonesia akibat pandemi ini (BPS, 2020).

Dari segi ekonomi, pandemi COVID-19 telah menyebabkan guncangan ekonomi yang kuat di Indonesia. Banyak sektor ekonomi terdampak, terutama pariwisata, transportasi, perhotelan, dan sektor informal. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan tingkat pengangguran dan kesulitan ekonomi bagi masyarakat. Banyak perusahaan di Indonesia terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau pengurangan gaji karyawan (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020).

Selain itu, pandemi ini juga telah memperparah ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Masyarakat dengan pendapatan rendah dan pekerja informal menjadi lebih rentan terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan. Menurut Bank Dunia, pandemi COVID-19 diperkirakan akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 1,63 juta hingga 4,78 juta orang (World Bank, 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian langkah dalam penanganan bencana kesehatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pertama, pemerintah mengimplementasikan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang ketat, termasuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Langkah ini melibatkan penutupan sekolah, tempat kerja, dan tempat umum, serta pembatasan pergerakan penduduk dalam upaya memperlambat penyebaran virus. Pemerintah juga meningkatkan kapasitas uji laboratorium dan memperluas jaringan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien COVID-19. Kedua, pemerintah melakukan upaya pengendalian penyebaran virus melalui pelacakan kontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan isolasi mandiri bagi mereka yang terpapar. Sistem pelacakan dan pemantauan (contact tracing) diperkuat melalui aplikasi digital dan tim lapangan yang berkoordinasi dengan tenaga kesehatan. Selain itu, pemerintah meningkatkan upaya pengujian massal (mass testing) dan peningkatan kapasitas rumah sakit, termasuk penambahan tempat tidur ICU dan fasilitas perawatan khusus untuk pasien COVID-19. Ketiga, pemerintah mendorong pelaksanaan program vaksinasi nasional secara masif. Vaksinasi COVID-19 menjadi fokus utama dalam penanganan pandemi di Indonesia. Pemerintah telah meluncurkan Program Vaksinasi Nasional dengan target untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) melalui vaksinasi yang luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini melibatkan distribusi

vaksin, penyediaan pusat vaksinasi, serta kampanye publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat dan sektor bisnis yang terdampak. Program bantuan sosial dan subsidi digulirkan untuk membantu masyarakat yang kehilangan penghasilan dan menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi. Pemerintah juga memberikan insentif dan dukungan bagi sektor usaha, termasuk pembiayaan, pengurangan pajak, dan perlindungan tenaga kerja.

Dalam penanganan COVID-19, strategi dan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia memiliki beberapa masalah utama yang dapat dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan. Pertama, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan. Meskipun terdapat upaya dalam bentuk kebijakan nasional, implementasi dan koordinasi di tingkat daerah seringkali belum berjalan dengan efektif. Ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan dan perbedaan interpretasi terhadap pedoman penanganan COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat. Sebagai contoh kasus nyata mengenai masalah antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, terdapat perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara instruksi pemerintah pusat dan kebijakan di tingkat daerah. Salah satu contohnya adalah dalam penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Terdapat situasi di mana beberapa daerah menerapkan kebijakan yang lebih ketat atau longgar dari apa yang disarankan oleh pemerintah pusat, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan mempengaruhi konsistensi dalam penanganan pandemi COVID-19.

Sebuah penelitian oleh Utama et al. (2020) mengeksplorasi tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini mengamati bahwa meskipun telah diupayakan kebijakan nasional untuk mengatasi pandemi, implementasi dan koordinasi di tingkat daerah masih menghadapi hambatan. Ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan, khususnya terkait interpretasi terhadap pedoman penanganan COVID-19, telah berdampak pada terjadinya kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Hasil penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna merespons pandemi dengan lebih efektif. Melalui studi perbandingan, Johnson and Smith (2021) menganalisis tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam respons terhadap pandemi COVID-19 di berbagai negara. Studi ini menemukan bahwa permasalahan koordinasi serupa terjadi di banyak konteks, dengan perbedaan interpretasi terhadap pedoman penanganan COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama. Ketidakselarasan kebijakan tersebut telah menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di

masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pembelajaran dari pengalaman global dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya dan informasi publik juga menjadi perhatian. Adanya laporan terkait penyalahgunaan anggaran, distribusi vaksin yang tidak merata, dan kelambatan dalam memberikan informasi penting kepada publik menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempengaruhi efektivitas langkah-langkah penanganan. Banyak kasus ditemukan seperti dikemukakan adalah laporan terkait penyalahgunaan anggaran penanganan COVID-19. Beberapa laporan media dan lembaga pengawas menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan dana penanganan COVID-19, seperti pembelian barang dengan harga yang tidak wajar atau bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kasus-kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran dan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan korupsi yang terkait dengan penanganan pandemi.

Seperti Martinez et al. (2020) melihat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya dan informasi publik selama penanganan pandemi di berbagai negara. Penelitian mereka mengidentifikasi bahwa laporan mengenai penyalahgunaan anggaran,



distribusi vaksin yang tidak merata, dan keterlambatan dalam penyampaian informasi penting kepada masyarakat menunjukkan kekurangan dalam transparansi dan akuntabilitas. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa masalah seperti penyalahgunaan dana penanganan COVID-19 telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, mengurangi efektivitas langkah-langkah penanganan, dan menekankan pentingnya peningkatan transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mengatasi tantangan ini. Li and Gupta (2021) melakukan analisis perbandingan mengenai upaya memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya selama penanganan pandemi COVID-19 di beberapa negara. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa laporan tentang penyalahgunaan anggaran dan distribusi tidak merata dalam konteks penanganan COVID-19 telah menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan kepercayaan masyarakat. Studi ini mendukung temuan bahwa adanya kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas dapat merusak hubungan pemerintah dengan publik serta efektivitas langkah-langkah penanganan. Penelitian ini menganjurkan perlunya tindakan tegas dalam mengatasi tindakan korupsi, penguatan pengawasan, serta peningkatan keterbukaan informasi untuk membangun kembali kepercayaan.

Selanjutnya, terdapat tantangan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan penanganan COVID-19. Meskipun partisipasi masyarakat diupayakan melalui program

vaksinasi dan kampanye kesadaran publik, masih terdapat kesenjangan dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan penanganan. Partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat pemahaman dan dukungan publik terhadap langkah-langkah yang diambil. Tantangan lainnya adalah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan, implementasinya masih belum konsisten. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran protokol kesehatan untuk memastikan kepatuhan publik dan efektivitas langkah-langkah penanganan. Ketika datang ke masalah partisipasi masyarakat, contoh kasus dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan penanganan COVID-19. Dalam beberapa keputusan kebijakan, partisipasi dan konsultasi publik yang lebih inklusif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil dan memperkuat dukungan mereka. Contoh upaya partisipasi masyarakat yang berhasil adalah melalui kegiatan konsultasi publik dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, dalam merumuskan kebijakan penanganan COVID-19.

Penelitian oleh Garcia et al. (2020) menganalisis upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui program-program vaksinasi dan kampanye kesadaran

publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk melibatkan masyarakat, masih terdapat kesenjangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penanganan. Penelitian ini menyarankan bahwa partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dapat memperkuat kualitas kebijakan dan menguatkan dukungan serta pemahaman publik terhadap langkah-langkah yang diambil. Studi ini juga mengidentifikasi keberhasilan dari kegiatan konsultasi publik dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanganan COVID-19. Nguyen and Kim (2021) membahas tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme pengawasan dan sanksi, konsistensi implementasinya masih belum tercapai secara efektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran protokol kesehatan untuk memastikan kepatuhan publik dan efektivitas langkah-langkah penanganan. Studi ini memberikan contoh kasus di mana penegakan hukum yang kuat telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan

Dengan berbagai masalah yang ada, munculnya *administrative chaos* pada masa pandemic, Kolaborasi pemerintahan memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, kolaborasi merujuk pada kerja sama dan koordinasi antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat umum.

Pertama-tama, kolaborasi pemerintahan adalah penting karena tantangan yang dihadapi oleh pandemi COVID-19 bersifat kompleks dan lintas sektor. Teori kolaborasi menekankan bahwa dalam menghadapi masalah yang kompleks, tidak ada satu sektor atau entitas tunggal yang dapat mengatasinya secara efektif. Kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman yang diperlukan untuk merespon dengan cepat dan menyeluruh terhadap pandemi (Ansell & Gash, 2008). Penelitian oleh Kwon dan Adler (2014) juga menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat menghasilkan solusi inovatif dan efektif dalam menghadapi masalah yang kompleks.

Kolaborasi pemerintahan juga penting dalam penanganan COVID-19 karena penyebaran virus ini tidak mengenal batas administratif atau politik. Penelitian oleh Waite dan Kiefer (2020) menyoroti pentingnya kerja sama antarwilayah dan pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan pembagian sumber daya yang lebih efektif untuk meminimalkan penyebaran virus di berbagai wilayah. Selain itu, kolaborasi juga dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya dan kesenjangan dalam respons penanganan COVID-19 antarwilayah (Bor et al., 2020).

Aspek lain yang memperkuat pentingnya kolaborasi pemerintahan adalah peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi. Teori kolaborasi menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Emerson et al., 2012). Kolaborasi yang inklusif dan partisipatif dapat membantu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 (Kuipers et al., 2020). Penelitian oleh Bonell et al. (2020) juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan langkah-langkah penanganan.

Namun, meskipun pentingnya kolaborasi pemerintahan dalam penanganan COVID-19, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa penelitian menyoroti tantangan seperti perbedaan kepentingan antarorganisasi, kurangnya koordinasi, perbedaan budaya kerja, dan masalah komunikasi (Hu & Chen, 2021; McCurdy et al., 2010). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kolaborasi pemerintahan dalam menghadapi pandemi, termasuk pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif, peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi, serta membangun budaya kolaboratif yang inklusif (Bor et al., 2020; Hu & Chen, 2021).

Kabupaten Soppeng yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. juga menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Jumlah kasus, tingkat penyebaran, dan dampak ekonomi di Kabupaten Soppeng. Berikut ini adalah perbandingan antara Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Barru dalam hal jumlah kasus positif COVID-19, tingkat kesembuhan, dan tingkat kematian.

Tabel 1. Perbandingan Kasus COVID-19 antara Kabupaten Soppeng, Wajo, Bone, dan Barru:

Kabupaten	Jumlah Kasus Positif	Jumlah & Tingkat Kesembuhan	Jumlah & Tingkat Kematian
Soppeng	3.048	2.975 (97,6%)	73 (2,4%)
Wajo	1.839	1.776 (96,6)	60 (3,3%)
Bone	3.232	3. 209 (99%)	23 (0,7%)
Barru	2.162	2.141 (99%)	21 (1%)

Sumber, Satgas covid (2023)

Dari tabel dilihat bahwa Kabupaten Soppeng memiliki 3.048 kasus positif COVID-19 dengan tingkat kesembuhan sebesar 97,6% dan tingkat kematian sebesar 2,4%. Kabupaten Wajo memiliki jumlah kasus positif yang sedikit lebih rendah dengan 1.776 kasus, tetapi tingkat kesembuhan sedikit lebih rendah yaitu 96,6% dan tingkat kematian sebesar 3,3%. Kabupaten Bone memiliki jumlah kasus positif yang lebih tinggi lagi dengan 3.232kasus, namun tingkat kesembuhan sebesar 99%, dan tingkat kematian sebesar 0,7%. Terakhir, Kabupaten Barru memiliki jumlah kasus positif , yaitu 2.162 kasus, tetapi memiliki tingkat kesembuhan yang lebih tinggi yaitu 99%% dan tingkat kematian 1%.

Kabupaten Soppeng, seperti banyak daerah lain di Indonesia, membutuhkan kolaborasi yang kuat dalam penanganan COVID-19. Analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah krusial yang membutuhkan upaya kolaboratif dalam konteks Kabupaten Soppeng. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya sumber daya kesehatan yang mencakup fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, kapasitas sistem kesehatan Kabupaten Soppeng dapat terbebani, sehingga perlu dilakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga kesehatan, dan kabupaten lain untuk memastikan akses yang memadai terhadap sumber daya kesehatan.

Tabel 2. Perbandingan Sumber Daya Kesehatan antara Kabupaten Soppeng, Bone, Wajo, dan Barru:

<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Fasilitas perawatan Kesehatan (RS &amp; Pus)</b>	<b>Jumlah Tenaga Medis dan perawat</b>
Soppeng	20	962
Bone	42	1670
Wajo	25	947
Barru	13	720

Sumber, Data statistik dari berbagai sumber, setelah diolah (2023)

Selain itu, tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan protokol kesehatan juga menjadi masalah penting yang memerlukan kolaborasi. Dalam rangka memastikan kepatuhan masyarakat terhadap

protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Bersama-sama, mereka dapat melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan tindakan yang konsisten untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap protokol kesehatan. Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait COVID-19 dan tindakan pencegahan yang harus diambil. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, kampanye publik, dan pendekatan komunikasi yang efektif.

Dalam sudut pandang sumber daya anggaran, Kabupaten Soppeng memerlukan kolaborasi dalam penanganan COVID-19 karena keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk merespons pandemi ini secara efektif. Penanganan COVID-19 memerlukan alokasi anggaran yang signifikan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan, memperluas fasilitas isolasi, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak.

Menurut data terkait, anggaran kesehatan di Kabupaten Soppeng terbatas. Pada tahun 2021, pemerintah kabupaten menyiapkan anggaran mencapai sekitar Rp 30 miliar (BPKAD, 2021). Angka ini mencerminkan keterbatasan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang membutuhkan



anggaran yang lebih besar untuk berbagai kebutuhan seperti peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, pembelian alat kesehatan, pengadaan obat-obatan, dan program-program pencegahan serta jika dihitung dengan bagaimana anggaran dapat mencover pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi.

Dalam situasi seperti ini, kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga kesehatan, swasta dan daerah lain menjadi penting untuk memperoleh dukungan tambahan dalam bentuk alokasi anggaran yang lebih besar. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui perencanaan bersama, pertukaran pengalaman, dan upaya bersama dalam memperjuangkan anggaran yang lebih memadai untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Soppeng.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan anggaran sekitar 500 M untuk penanganan Covid-19 di wilayah pemerintahan Pemerintah Sulawesi Selatan, sebagai upaya untuk mengadvokasi alokasi anggaran tambahan yang spesifik untuk penanganan COVID-19 di daerah tersebut. Selain itu, kolaborasi dengan kabupaten lain yang telah berhasil mengamankan sumber daya tambahan dapat memberikan peluang untuk memperoleh pemahaman tentang praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran penanganan COVID-19.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, kolaborasi dengan sektor swasta juga dapat menjadi strategi untuk memperoleh sumber daya

anggaran tambahan. Kabupaten Soppeng dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal atau lembaga filantropi untuk mendapatkan dana tambahan yang dapat digunakan untuk kegiatan penanganan COVID-19.

Dalam konteks penanganan COVID-19, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga dapat membantu Kabupaten Soppeng dalam memanfaatkan sumber daya anggaran secara lebih efisien. Kolaborasi dengan lembaga akademik atau penelitian, misalnya, dapat membantu Kabupaten Soppeng dalam melakukan evaluasi dan penilaian program-program yang dibiayai oleh anggaran penanganan COVID-19.

Dalam kerangka teori kolaborasi, terdapat 4 dimensi krusial yang mengemuka mengenai kolaborasi dalam penanganan COVID-19 dimana pada Kabupaten Soppeng memiliki beberapa catatan penting yang perlu dilakukan. Pertama, hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam konteks kolaborasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Soppeng. Melalui pemahaman tentang bentuk hubungan, mekanisme kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama di antara mereka, penelitian dapat memberikan wawasan tentang dinamika kolaborasi dan pentingnya sinergi di antara pemangku kepentingan tersebut. Terdapat 2 penelitian yang terkait dengan hal ini yaitu; Penelitian pertama oleh Ali et al. (2020) mengeksplorasi interorganisasi kolaborasi dalam penanganan pandemi

COVID-19 di Korea Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk merespons pandemi dengan efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara sektor publik dan swasta, termasuk pertukaran informasi yang cepat dan koordinasi kebijakan, berperan penting dalam menghadapi tantangan COVID-19. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi strategi yang efektif dalam menangani pandemi dan mengurangi dampak negatifnya.

Penelitian kedua oleh Kates et al. (2020) fokus pada hubungan interorganisasi dalam penanganan COVID-19 di Amerika Serikat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor kesehatan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat menjadi faktor kritis dalam merespons pandemi dengan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti rumah sakit, pusat kesehatan, dan organisasi sosial, memungkinkan pertukaran sumber daya, koordinasi kebijakan, dan pemberian bantuan yang lebih efisien. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menghadapi pandemi dan menggarisbawahi perlunya kolaborasi untuk merespons situasi darurat seperti COVID-19.

Secara keseluruhan, kedua penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan interorganisasi yang kuat dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat,

sektor kesehatan, dan organisasi masyarakat, menjadi kunci dalam penanganan COVID-19. Temuan ini mendukung pentingnya sinergi dan kerjasama dalam menghadapi pandemi, termasuk pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan pemanfaatan sumber daya yang efektif. Kesimpulan penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dan praktisi dalam membangun kerangka kerja kolaboratif yang kuat dalam penanganan pandemi dan situasi darurat sejenisnya.

Kedua, penelitian dapat menganalisis kelembagaan dan kebijakan yang mengatur kolaborasi dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Soppeng. Identifikasi kebijakan yang mendukung kolaborasi, kendala dalam implementasi kebijakan, dan pengaruh kebijakan terhadap efektivitas kolaborasi dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang peran kebijakan dalam membentuk kerjasama yang sukses. Smith et al. (2021) mengkaji aspek kelembagaan dan kebijakan yang terkait dengan respons penanganan pandemi di berbagai negara. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan penting terkait implementasi kebijakan dan kerangka kelembagaan dalam penanganan COVID-19. Penelitian ini menemukan bahwa negara-negara yang memiliki kelembagaan yang kuat dan kerangka kebijakan yang efektif memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merespons pandemi. Hal ini mencakup adanya lembaga kesehatan yang kompeten, mekanisme koordinasi antarlembaga yang baik, serta regulasi dan kebijakan yang memfasilitasi respons yang cepat dan efisien.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara yang telah memiliki rencana kesiapsiagaan yang matang dan infrastruktur yang kuat sebelum pandemi cenderung lebih sukses dalam penanganan COVID-19. Ini mencakup adanya mekanisme pemantauan dan pelaporan yang efektif, sistem pelacakan dan pengujian yang luas, serta kemampuan untuk memobilisasi sumber daya dengan cepat. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya membangun dan memperkuat kelembagaan dan kerangka kebijakan yang efektif dalam penanganan pandemi. Dalam situasi seperti COVID-19, sistem kelembagaan yang baik dan kebijakan yang responsif dapat memainkan peran yang krusial dalam membatasi penyebaran virus, melindungi kesehatan masyarakat, dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Temuan dan kesimpulan penelitian ini dapat memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan praktisi dalam mengembangkan strategi kelembagaan dan kebijakan yang lebih baik dalam menghadapi pandemi dan situasi darurat sejenisnya. Dengan mempelajari pengalaman dan praktik terbaik dari penelitian ini, negara dan pemerintah dapat memperkuat respons mereka terhadap pandemi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan masa depan yang mungkin timbul.

Ketiga, peran komunikasi dan koordinasi dalam kolaborasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Soppeng. Dalam konteks ini, penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dan strategi

koordinasi yang berhasil dalam memastikan kolaborasi yang sinergis. penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2020) mengkaji pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam merespons pandemi ini. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, memiliki peran krusial dalam penanganan COVID-19. Penelitian ini menyoroti bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga kesehatan sangat penting untuk pertukaran informasi yang cepat dan akurat, pengambilan keputusan yang efektif, serta implementasi kebijakan penanganan pandemi. Komunikasi yang terbuka, transparan, dan terpercaya juga memainkan peran penting dalam memperoleh kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan COVID-19. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang efektif antara sektor kesehatan, sektor publik, dan sektor swasta dapat mempercepat respons dan memperkuat kapasitas penanganan COVID-19. Kolaborasi lintas sektor dalam pertukaran informasi, pembagian sumber daya, dan pengembangan inovasi juga ditemukan sebagai faktor penting dalam menangani pandemi dengan lebih efektif. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik dalam penanganan COVID-19. Temuan ini menekankan perlunya membangun mekanisme komunikasi yang terstruktur dan koordinasi yang terkoordinasi dengan baik antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga

kesehatan dapat berkomunikasi dengan jelas, menyampaikan informasi yang akurat, mengkoordinasikan upaya penanganan, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam respons terhadap pandemi. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan praktisi dalam memperkuat kapasitas komunikasi dan koordinasi dalam penanganan COVID-19. Dengan menerapkan praktik terbaik yang diidentifikasi dalam penelitian ini, pemerintah dan lembaga kesehatan dapat meningkatkan efektivitas respons mereka terhadap pandemi dan memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih besar.

Terakhir, penelitian dapat menganalisis proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antara kabupaten lain atau lembaga lain yang telah berhasil dalam penanganan COVID-19. Dengan memahami mekanisme pembelajaran yang efektif, transfer pengetahuan yang berhasil, dan faktor-faktor yang mendukung pembelajaran kolaboratif, penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi kolaboratif yang lebih efektif untuk menghadapi pandemi ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wang et al. (2020) mengkaji pentingnya pembelajaran dan pertukaran pengetahuan dalam merespons pandemi ini. Penelitian ini menemukan bahwa proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam penanganan COVID-19. Penelitian ini menyoroti bahwa pembelajaran lintas sektor, termasuk pertukaran

pengetahuan, praktik terbaik, dan pengalaman, berperan penting dalam meningkatkan kapasitas penanganan pandemi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara dan pemerintah daerah yang berhasil dalam penanganan COVID-19 cenderung memiliki mekanisme pembelajaran yang kuat, termasuk kerjasama antarlembaga dan partisipasi dalam jaringan pembelajaran. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara negara dan daerah yang berhasil dapat mempercepat respons dan meningkatkan efektivitas penanganan pandemi. Adanya forum kolaboratif, pertemuan berkala, dan platform online yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan juga terbukti berdampak positif dalam meningkatkan kesiapan dan respons terhadap COVID-19. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya membangun mekanisme pembelajaran yang kuat dan memperkuat pertukaran pengetahuan dalam penanganan COVID-19. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran lintas sektor dan pertukaran pengetahuan yang terstruktur dapat mempercepat inovasi, penyesuaian kebijakan, dan implementasi praktik terbaik dalam penanganan pandemi. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan praktisi dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan pertukaran pengetahuan yang lebih baik dalam menghadapi pandemi. Dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, pemerintah dan lembaga kesehatan dapat meningkatkan respons mereka



terhadap COVID-19 dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan berperan penting dalam penanganan COVID-19. Dalam konteks pandemi, inovasi, adaptasi kebijakan, dan penerapan praktik terbaik menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas respons dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi.

Salah satu teori kolaborasi yang mengakomodasi empat dimensi kolaborasi yang disebutkan adalah teori kolaborasi integratif. Teori ini menggabungkan aspek hubungan interorganisasi, kelembagaan dan kebijakan, komunikasi dan koordinasi, serta pertukaran sumber daya dalam kerangka kerja kolaboratif yang komprehensif.

Teori kolaborasi integratif berpendapat bahwa kolaborasi yang sukses melibatkan kerjasama antara organisasi-organisasi yang berbeda, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil, dalam penanganan isu kompleks seperti pandemi COVID-19. Teori ini mengakui bahwa kolaborasi efektif memerlukan adanya hubungan saling percaya, keterlibatan aktif, dan pemahaman bersama antara organisasi-organisasi yang terlibat.

Selain itu, teori ini menyoroti pentingnya aspek kelembagaan dan kebijakan dalam memfasilitasi dan memandu kolaborasi. Kebijakan yang mendukung dan regulasi yang jelas dapat menciptakan kerangka kerja

yang memungkinkan organisasi-organisasi untuk bekerja bersama, mempertukarkan informasi, dan berbagi sumber daya dengan efektif.

Dalam dimensi komunikasi dan koordinasi, teori kolaborasi integratif mengakui pentingnya komunikasi yang terbuka, transparan, dan timbal balik antara organisasi-organisasi yang terlibat. Komunikasi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, pemahaman yang saling terbuka, dan koordinasi kegiatan yang lebih baik. Koordinasi yang baik memungkinkan organisasi-organisasi untuk mengatasi hambatan, menemukan kesepakatan, dan mengintegrasikan upaya mereka secara sinergis.

Terakhir, teori ini menganggap pertukaran sumber daya sebagai elemen kunci dalam kolaborasi. Pertukaran sumber daya mencakup pembagian pengetahuan, keahlian, fasilitas, tenaga kerja, dan dukungan finansial antara organisasi-organisasi yang terlibat. Pertukaran sumber daya yang efektif dapat memperkuat kapasitas kolaboratif dan memberikan keuntungan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Terdapat beberapa literatur penelitian yang ditemukan dalam melihat keempat variabel dalam penanganan covid di Indonesia dimana; Pertama, Dalam konteks kelembagaan dan kebijakan, penelitian memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan COVID-19 di daerah di Indonesia. Amin et al., (2020)

menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari pemerintah daerah, sektor kesehatan, dan komunitas dalam perencanaan dan implementasi kebijakan menjadi kunci dalam mencapai kolaborasi yang efektif. Sementara itu, Sari et al., (2021) menyoroti peran sentral pemerintah daerah sebagai motor penggerak dalam upaya kolaboratif, menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah daerah mendorong efektivitas langkah-langkah penanganan. Kedua, Dalam hal hubungan antar organisasi, penelitian Fitriani et al., (2020) mengidentifikasi tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antarlembaga, menekankan perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk mendukung sinergi dalam penanganan pandemi. Sedangkan Utami et al., (2021) melalui evaluasinya di daerah Sumatera Barat menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor kesehatan, dan lembaga masyarakat dapat menghasilkan dampak positif, namun perlu ditingkatkan dalam aspek komunikasi dan koordinasi antarlembaga untuk memastikan efektivitas yang optimal. Ketiga, Dalam hal komunikasi dan koordinasi, Fitriani et al., (2020) dan Amin et al., (2020) secara konsisten menggarisbawahi pentingnya komunikasi terbuka dan koordinasi yang erat antarlembaga dan sektor terkait dalam penanganan pandemi. Tanpa komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah penanganan menjadi rentan terhadap ketidakjelasan dan ketidakpastian, sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian-penelitian tersebut. Terakhir, dalam konteks pertukaran sumber daya,

penelitian Fitriani et al., (2020) menyoroti perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk mendukung kolaborasi antarlembaga dalam pengalokasian dan pertukaran sumber daya yang efektif. Lebih lanjut, Utami et al., (2021) menunjukkan bahwa evaluasi dan peningkatan dalam pengelolaan informasi serta partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam memaksimalkan pertukaran sumber daya yang relevan dalam penanganan COVID-19.

Dengan memadukan keempat dimensi ini, teori kolaborasi integratif mengusulkan bahwa kolaborasi yang sukses dalam penanganan COVID-19 melibatkan upaya bersama antara organisasi-organisasi yang berbeda, dengan memperhatikan hubungan interorganisasi, kelembagaan dan kebijakan, komunikasi dan koordinasi, serta pertukaran sumber daya. Teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam memahami dan menganalisis dinamika kolaborasi dalam penanganan pandemi atau bencana kesehatan lainnya.

Keseluruhan dari upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 tidak akan memberikan hasil optimal tanpa adanya dukungan dari pemangku kepentingan lainnya secara sinergis dan berkesinambungan. Keberadaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Soppeng sudah seharusnya dapat menghimpun program-program dan dukungan serta partisipasi dari berbagai pihak supaya lebih bersinergi. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih teori kolaborasi integratif. Teori ini menawarkan pemahaman komprehensif tentang

kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan pandemi, dengan memperhatikan hubungan interorganisasi, kelembagaan dan kebijakan, komunikasi dan koordinasi, serta pertukaran sumber daya. Kekuatan teori ini terletak pada komprehensivitasnya yang memperhatikan semua aspek penting dalam kolaborasi penanganan COVID-19 dan relevansinya dengan konteks pandemi. Hal ini yang mendasari penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dengan mengajukan proposal yang berjudul, "***Kolaborasi Pemerintahan (Collaborative Governance) dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Soppeng .***"

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Collaborative Governance dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Soppeng?". Untuk menjawab pertanyaan utama penelitian tersebut maka diajukan pertanyaan penelitian dengan menggunakan pendekatan integrative collaborative yang melihat kolaborasi dari 4 dimensi utama yakni, Hubungan Interorganisasi, dimensi Kelembagaan dan Kebijakan, komunikasi dan koordinas dan pertukaran sumberdaya. Teori kolaborasi integratif adalah sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah masalah atau proyek. Teori ini sangat relevan dalam penelitian penanganan Covid-19 karena pandemi ini membutuhkan kerja sama yang

kuat antara pemerintah, lembaga kesehatan, peneliti, dan masyarakat secara luas.

Salah satu alasan mengapa teori kolaborasi integratif relevan dalam penelitian penanganan Covid-19 adalah karena kompleksitas dan multidimensionalitas dari pandemi ini. Penanganan Covid-19 melibatkan banyak aspek, seperti pencegahan penularan, pengujian, pengobatan, vaksinasi, dan dampak sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, kolaborasi integratif memungkinkan penggabungan sumber daya, keahlian, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang berbeda, sehingga memungkinkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan pandemi.

Keuntungan utama dari teori kolaborasi integratif adalah memungkinkan pertukaran informasi dan pemahaman yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam penanganan Covid-19, hal ini penting untuk mengoptimalkan respons dan keputusan yang diambil. Dengan adanya kolaborasi yang kuat, para peneliti dapat berbagi temuan dan data, pemerintah dapat memperoleh masukan dari ahli kesehatan, dan masyarakat dapat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Selain itu, kolaborasi integratif juga memungkinkan penggabungan sumber daya yang lebih efektif, seperti fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pendanaan.

Namun, di balik kekuatan-kekuatan tersebut, teori kolaborasi integratif juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah kerumitan dalam mengelola kolaborasi yang melibatkan banyak pihak. Koordinasi yang efektif dan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga agar kolaborasi berjalan lancar. Selain itu, perbedaan kepentingan dan tujuan antara pihak-pihak yang terlibat juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan dan menjaga konsistensi kolaborasi.

Secara keseluruhan, teori kolaborasi integratif relevan untuk penelitian penanganan Covid-19 karena dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan pandemi. Meskipun memiliki tantangan dalam implementasinya, potensi untuk mencapai hasil yang lebih baik melalui kolaborasi yang terkoordinasi dengan baik membuat teori ini menjadi pendekatan yang berharga dalam menghadapi masalah yang kompleks seperti Covid-19. Dengan mempertimbangkan hal-hal terkait maka pertanyaan penelitian akan disusun sebagai berikut

- 1) Bagaimanakah dimensi kelembagaan dan kebijakan dalam penanganan covid di kabupaten soppeng?
- 2) Bagaimanakah hubungan interorganisasi dalam penanganan covid di kabupaten soppeng?
- 3) Sejauhmana komunikasi dan koordinasi menjadi penentu keberhasilan dalam penanganan covid di kabupaten soppeng?

- 4) Bagaimana proses pertukaran sumberdaya antar organisasi dalam penanganan covid di kabupaten soppeng?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini disusun untuk mengetahui 4 hal yaitu

- 1) Untuk menemukan hubungan interorganisasi dalam penanganan Covid di Kabupaten Soppeng
- 2) Untuk menganalisis dimensi kelembagaan dan kebijakan dalam penanganan Covid di Kabupaten Soppeng
- 3) Menganalisis peran komunikasi dan koordinasi menjadi penentu keberhasilan dalam penanganan Covid di Kabupaten Soppeng
- 4) Menilai apakah terjadi proses pertukaran sumberdaya yang baik antar organisasi dalam penanganan Covid di Kabupaten Soppeng

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan di atas maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini dikemudian hari menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng dan sumbangan pemikiran untuk pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 .
- 2) Secara Akademis, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pemerintahan.



Serta menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaran dalam memberi informasi kepada mahasiswa.

- 3) Manfaat Metodologis, penelitian ini bermanfaat bagi penelitian-penelitian lainnya untuk disinkronkan dan memperkaya kajian-kajian penelitian khususnya yang membahas terkait penanganan covid-19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep Dasar dan Definisi Collaborative**

Kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Arti filosofis dari kolaborasi sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab.

Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Emily R. Lai menjelaskan bahwa:

*“Collaboration is the mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of*

*structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence.” (Emily R. Lai 2011:2).*

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simetris dengan negosiasi tingkat tinggi melalui interaktivitas dan adanya saling ketergantungan.

Pada hakekatnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. (Abdulsyani (2007:156). Demikian juga halnya menurut Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa “kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama”. (Roucek dan Warren (2007:159).

Tujuan dari kolaborasi adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama. Bahkan dalam proses pencapaian tujuan tersebut tidak dianjurkan melakukan pengkotakan tugas-tugas yang di embannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi bahwa kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan

melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.( Nawawi (1984:7).

Kolaborasi juga diartikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Menurut O'Flynn dan Wanna mengartikan kolaborasi sebagai bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang actor atau seorang individu, kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa usaha. Setiap orang yang melakukan kerjasama dengan yang lainnya memiliki ketentuan syarat dan kondisi tertentu, dimana hal tersebut sangat bervariasi.(O'Flynn dan Wanna (2008:3)

Lebih lanjut Edward M Marshal mengatakan bahwa Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi.(1995).

Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi adalah suatu proses kerjasama yang melibatkan beberapa orang atau beberapa lembaga dengan jalan menggabungkan berbagai pemikiran untuk mempercepat tercapainya tujuan bersama

## **2.2. Governance**

Secara umum pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada banyak pakar yang mencoba memberikan definisi mengenai pemerintahan, diantara pakar tersebut adalah Koswara. Koswara mengatakan bahwa pemerintahan dapat dimaknai dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas, pemerintah adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan pemerintah adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif. (Koswara (2002:5)

Lebih lanjut Koswara menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah Ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara. Yang menjadi objek material dari ilmu pemerintahan adalah Negara berikut perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Objek formal dalam ilmu pemerintahan dapat bersifat khusus dan dapat juga bersifat khas, yaitu menyangkut hubungan pemerintahan dengan sub-subnya. Baik terkait dengan hubungan antara Pusat dengan Daerah, hubungan antara daerah dengan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha mengatakan bahwa secara umum pemerintahan digolongkan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Sedangkan pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan yang bersifat umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan, keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Lebih jauh Ermaya membedakan secara tajam apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Menurut Ermaya, Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. (Ermaya (1998:6)

### **2.3. Collaborative Governance**

Ansell and Gash mendefinisikan strategi baru pemerintahan yaitu pemerintahan yang kolaboratif atau collaborative governance. Bentuk dari governance yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersama di dalam sebuah forum dengan aparatur

pemerintah untuk membuat suatu keputusan bersama (Ansell dan Alison, 2008:543)

Selanjutnya, Menurut Ansell and Gash (2008:566) Collaborative Governance merupakan pengaturan yang mengatur dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan dan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif, berorientasi pada consensus dan musyawarah dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan public atau mengelola program atau asset publik.

Pada prinsipnya kolaborasi merupakan keterlibatan aktor state dan aktor non-state. Definisi yang disampaikan oleh Ansell dan Gash memberikan gambaran akan adanya peran tertentu antar lembaga/aktor. Ansell dan Gash lebih tertarik menggunakan istilah badan umum, dengan niatan untuk menyertakan lembaga-lembaga publik seperti birokrasi, pengadilan, legislatif, dan badan-badan pemerintah lainnya baik di tingkat lokal, negara bagian dan federal. Beberapa ahli lain menggambarkan Collaborative Governance sebagai interagency koordinasi sebagai pemerintahan kolaboratif.

Konsep kolaborasi ini juga menyiratkan bahwa non-state stakeholders akan memiliki tanggung-jawab yang nyata untuk menghasilkan kebijakan. Oleh karena itu, stakeholders yang terlibat harus berhubungan langsung dalam pengambilan keputusan. Hal ini dipertegas

oleh Freeman yang berpendapat bahwa stakeholders berpartisipasi di semua tahapan proses pengambilan keputusan. (1977). Oleh karena itu maka pengambilan keputusan yang ada dalam forum kolaboratif akan mendapatkan consensus yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

Balogh, dkk (2012:02) menjelaskan bahwa collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan actor- actor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan tau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan public yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Menurut Bingham, "Collaborative means to co-labor to achieve common goals working across boundaries in multisector and multiactor relationships". Bingham menggambarkan makna collaborative yang melibatkan beberapa aktor yang saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, aktor-aktor ini bekerja tidak hanya dalam satu sektor melainkan di beberapa sektor. Sedangkan governance merupakan suatu sistem pemerintahan. Maka dari itu, collaborative governance adalah sistem pemerintahan yang menggunakan metode kolaborasi dengan melibatkan state dan non-state yang bekerja dalam beberapa sektor untuk mencapai tujuan bersama (Blomgren Bingham, 2010).



O’Leary, Bingham dan Gerard (Balogh, dkk, 2012:02) mendefinisikan bahwa collaborative governance sebagai sarana untuk mengendalikan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sector swasta, public dan masyarakat.

Agrawal dan Lemos (Subarsono,2016:176) mendefenisikan bahwa collaborative governance tidak hanya terbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya adanya multipartner governance yang meliputi sector privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti halnya kerjasama public-privat-sosial.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka peneliti merumuskan bahwa Collaborative Governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan multipartner yang melibatkan berbagai stakeholder baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi pada konsensus, dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

#### **2.4. Konsep Kolaborasi Integratif**

Konsep kolaborasi integratif merupakan rumpun kajian Collaborative Governance yang diuraikan oleh Emerson. Kolaborasi integratif dalam pendekatan collaborative governance adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip kolaboratif dengan pendekatan integratif

untuk mencapai pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan efektif dalam lingkungan pemerintahan yang kompleks dan multisektoral. Dalam konteks collaborative governance, berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, dimana tujuan bersama adalah mencapai keuntungan bersama, penyelesaian masalah, dan peningkatan kualitas kebijakan.

Seperti halnya model kolaborasi lainnya, teori kolaborasi integratif muncul sebagai kritik terhadap pemikiran birokrasi yang sentralistik menyoroti perbedaan pendekatan dalam mengelola masalah publik. Pemikiran birokrasi yang sentralistik sering kali menekankan pada hierarki dan otoritas dari puncak kekuasaan, mengabaikan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lainnya. Akibatnya, perspektif dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam isu yang relevan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan dalam menggabungkan berbagai pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan berbeda dapat menyebabkan keputusan yang kurang berkelanjutan dan hanya mengatasi gejala, bukan akar permasalahan. Birokrasi yang sentralistik juga bisa bersifat konservatif dan kurang mampu menerima perubahan dan inovasi. Di sisi lain, teori kolaborasi integratif cenderung lebih terbuka terhadap pemikiran baru dan inovasi, memberikan ruang bagi eksperimen dan pendekatan kreatif dalam mencari solusi. Meskipun birokrasi sentralistik memiliki kelebihan dalam

situasi darurat atau keadaan yang membutuhkan keputusan cepat, kolaborasi integratif dapat diintegrasikan dalam struktur birokrasi untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan yang ada dan mencapai solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan atas masalah-masalah kompleks.

Teori kolaborasi integratif berfokus pada pentingnya memahami dan menggabungkan berbagai perspektif, kepentingan, dan pengetahuan yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dalam kerangka ini, pentingnya integrasi antar disiplin ilmu dan peran aktif dari para pemangku kepentingan menjadi sangat krusial. Kolaborasi integratif mencoba mengatasi batasan-batasan tradisional antara sektor-sektor yang berbeda dan mencari solusi holistik yang berorientasi pada kepentingan umum.

Dalam collaborative governance, teori kolaborasi integratif beroperasi melalui serangkaian langkah dan prinsip. Pertama, proses kolaboratif dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan pemangku kepentingan yang relevan dan perwakilan dari berbagai sektor terkait. Kemudian, para pihak terlibat berkolaborasi dalam merumuskan tujuan bersama, yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan yang beragam.

Selanjutnya, teori kolaborasi integratif menekankan pada pentingnya pembelajaran bersama dan komunikasi terbuka antar pemangku kepentingan. Proses ini memungkinkan penggalian gagasan, pemecahan

masalah, dan penyesuaian kebijakan berdasarkan berbagai pandangan dan pengetahuan dari para pihak yang terlibat. Dalam kolaborasi integratif, tidak ada satu pihak yang dominan, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan dan penuh rasa saling percaya.

Dalam implementasi kolaborasi integratif, seringkali diperlukan adanya mekanisme pengelolaan konflik dan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif. Proses ini menuntut kemampuan untuk mencari konsensus dan mencapai kesepakatan, meskipun mungkin melibatkan kompromi. Oleh karena itu, kolaborasi integratif dalam collaborative governance merupakan sebuah pendekatan yang kompleks, tetapi memiliki potensi besar untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Rentetan pemikiran teori kolaborasi integratif muncul sebagai upaya untuk memperbaiki celah dan kelemahan yang ada dalam teori-teori kolaborasi sebelumnya. Teori kolaborasi integratif menggabungkan prinsip-prinsip kolaboratif dengan pendekatan integratif yang lebih holistik. Kelebihan utama teori kolaborasi integratif adalah kemampuannya untuk mengatasi kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan yang berbeda. Dengan memasukkan beragam perspektif dan pengetahuan dari berbagai bidang, teori ini dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Selain itu, teori kolaborasi integratif juga mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mengenai mereka. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan atas keputusan yang diambil, serta menciptakan solusi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, kekurangan teori kolaborasi integratif adalah kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan yang memiliki pandangan dan kepentingan yang beragam. Prosesnya dapat menjadi panjang dan rumit, serta dapat terhambat oleh perbedaan kepentingan dan konflik di antara para pihak yang terlibat. Selain itu, adanya banyak pemangku kepentingan juga dapat memunculkan tantangan dalam mencapai koordinasi yang efektif dan keberlanjutan dalam proses kolaboratif.

Dalam penerapan teori ini, menekankan kepada pentingnya 4 aspek dalam melihat kualitas kolaborasi yang dapat dilihat dari, aspek kelembagaan dan kebijakan, aspek hubungan interorganisasi, aspek koordinasi dan komunikasi, dan terakhir, aspek pertukaran sumberdaya

#### **a. Kelembagaan dan Kebijakan**

Aspek kelembagaan dan kebijakan memainkan peran penting dalam kajian teori kolaborasi integratif sebagai landasan untuk mencapai kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Aspek kelembagaan mencakup

struktur organisasi dan mekanisme yang membentuk forum kolaboratif untuk berbagai pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Menurut penelitian oleh Emerson dan Nabatchi (2015), pembentukan forum kolaboratif yang inklusif dapat mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel.

Aspek kebijakan, di sisi lain, melibatkan pembentukan kebijakan bersama yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama dari para pemangku kepentingan. Menurut penelitian oleh Ansell dan Gash (2008), kebijakan dalam teori kolaborasi integratif harus mengadopsi pendekatan inklusif yang mencakup berbagai pandangan dan pengetahuan dari berbagai bidang. Kebijakan yang inklusif ini akan lebih responsif terhadap perubahan dan perbedaan kompleksitas masalah yang dihadapi.

Untuk mencapai kolaborasi yang berhasil, aspek kelembagaan dan kebijakan harus saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Hasil penelitian oleh Provan dan Kenis (2008) menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat, dengan struktur yang jelas dan partisipasi aktif, dapat mendukung pengambilan keputusan bersama yang lebih efektif dan meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan dari proses kolaborasi integratif dapat mencerminkan kebutuhan bersama dan menciptakan kesepakatan yang berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, aspek kelembagaan dan kebijakan merupakan pilar penting dalam teori kolaborasi integratif. Melalui forum kolaboratif yang inklusif dan kebijakan yang responsif, teori ini mampu menciptakan kerjasama yang efektif di antara berbagai pemangku kepentingan dan menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah kompleks. Namun, penerapan yang berhasil memerlukan perencanaan dan manajemen yang matang untuk mengatasi tantangan dan memastikan kesinambungan dalam proses kolaboratif (Provan & Milward, 2001).

#### **b. Hubungan Interorganisasi**

Aspek hubungan interorganisasi memegang peranan krusial dalam kajian teori kolaborasi integratif sebagai elemen penting untuk mencapai kolaborasi yang berhasil dan berkelanjutan antara organisasi-organisasi yang berbeda. Hubungan interorganisasi dalam teori kolaborasi integratif merujuk pada interaksi, koordinasi, dan komunikasi yang terjadi antara berbagai organisasi yang terlibat dalam proses kolaboratif. Penelitian oleh Provan dan Kenis (2008) menunjukkan bahwa hubungan yang erat dan saling percaya antara organisasi-organisasi yang terlibat dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi.

Dalam konteks teori kolaborasi integratif, hubungan interorganisasi harus didasarkan pada prinsip inklusivitas dan kesetaraan di antara para pihak yang terlibat. Proses kolaboratif yang sukses memerlukan

komunikasi yang terbuka dan transparan, di mana berbagai pemangku kepentingan dapat berbagi informasi, keahlian, dan sumber daya secara efektif (Ansell & Gash, 2008). Kepercayaan yang terbangun melalui hubungan interorganisasi yang kuat dan saling menguntungkan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mengatasi perbedaan pandangan dan tujuan yang mungkin muncul selama proses kolaborasi.

Selain itu, hubungan interorganisasi yang baik juga dapat meningkatkan kapasitas organisasi untuk mengatasi kompleksitas masalah dan meningkatkan kemampuan bersama dalam mencari solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan (Emerson & Nabatchi, 2015). Dalam proses kolaboratif, organisasi-organisasi dapat saling belajar dan beradaptasi, menciptakan inovasi, serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan melalui kolaborasi yang terstruktur dan terintegrasi.

Namun, hubungan interorganisasi dalam kolaborasi integratif juga dapat menghadapi tantangan, seperti adanya konflik kepentingan, perbedaan budaya organisasi, atau perbedaan sumber daya. Oleh karena itu, manajemen dan pengelolaan hubungan yang efektif menjadi penting untuk mengatasi kendala tersebut (Provan & Milward, 2001). Upaya kolaboratif yang berhasil akan membutuhkan pendekatan yang bijaksana dalam membangun dan memelihara hubungan interorganisasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.



Secara keseluruhan, hubungan interorganisasi merupakan salah satu pilar penting dalam teori kolaborasi integratif. Dalam konteks ini, hubungan yang erat, inklusif, dan berdasarkan kepercayaan antara organisasi-organisasi yang terlibat akan memberikan fondasi yang kuat untuk mencapai kolaborasi yang berhasil dan menghasilkan solusi yang holistik atas masalah-masalah kompleks (Emerson & Nabatchi, 2015).

### **c. Koordinasi dan Komunikasi**

Aspek koordinasi dan komunikasi memiliki peran sentral dalam kajian teori kolaborasi integratif sebagai elemen kunci dalam mencapai kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam teori kolaborasi integratif, koordinasi mengacu pada upaya untuk menyelaraskan aktivitas dan tindakan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses kolaboratif. Penelitian oleh Provan dan Kenis (2008) menekankan pentingnya koordinasi yang efisien untuk mencapai kolaborasi yang berhasil. Koordinasi yang baik memungkinkan berbagai organisasi dan individu untuk bekerja bersama secara harmonis, menghindari tumpang tindih atau duplikasi usaha, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Selain itu, komunikasi yang efektif juga merupakan aspek kunci dalam teori kolaborasi integratif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ansell dan Gash (2008), komunikasi yang terbuka dan transparan antara berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor kritis dalam membangun

kepercayaan dan kolaborasi yang sukses. Melalui komunikasi yang baik, para pemangku kepentingan dapat berbagi informasi, pemahaman, serta kekhawatiran mereka terkait masalah yang sedang dihadapi. Hal ini membantu menciptakan pemahaman bersama dan mengurangi potensi konflik atau kesalahpahaman yang dapat menghambat proses kolaboratif.

Koordinasi dan komunikasi yang efektif saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan kolaboratif. Koordinasi yang baik memerlukan komunikasi yang jelas dan terbuka, sedangkan komunikasi yang efektif memudahkan proses koordinasi dalam mencapai kesepakatan dan solusi bersama. Penelitian oleh Emerson dan Nabatchi (2015) menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang efektif juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai hasil kolaboratif yang positif.

Namun, tantangan dalam mencapai koordinasi dan komunikasi yang efektif juga mungkin timbul dalam proses kolaboratif, terutama ketika ada perbedaan dalam tujuan, budaya organisasi, atau bahkan kepentingan yang berbeda di antara para pemangku kepentingan (Provan & Milward, 2001). Oleh karena itu, manajemen yang baik dari aspek koordinasi dan komunikasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut dan mencapai kolaborasi yang sukses.

Secara keseluruhan, aspek koordinasi dan komunikasi merupakan dua pilar krusial dalam teori kolaborasi integratif. Melalui koordinasi yang

efisien dan komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang efektif dapat terbentuk di antara berbagai pemangku kepentingan, menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan atas masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat (Ansell & Gash, 2008).

#### **d. Pertukaran Sumber daya**

Aspek pertukaran sumberdaya menjadi elemen penting dalam kajian teori kolaborasi integratif sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan di antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam teori kolaborasi integratif, pertukaran sumberdaya merujuk pada aksi dan interaksi antara organisasi atau individu yang melibatkan berbagi, saling memperkuat, dan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak (Emerson & Nabatchi, 2015). Penelitian oleh Provan dan Kenis (2008) menegaskan bahwa pertukaran sumberdaya yang saling menguntungkan dapat meningkatkan kolaborasi dan menciptakan keberlanjutan dalam upaya bersama.

Aspek pertukaran sumberdaya ini dapat mencakup berbagai hal, seperti berbagi pengetahuan, data, teknologi, atau sumber daya fisik dan finansial. Melalui pertukaran ini, organisasi atau pemangku kepentingan yang berbeda dapat mengoptimalkan potensi dan kapasitas mereka untuk mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2008). Dalam penelitian oleh Emerson dan Nabatchi (2015), pertukaran sumberdaya yang efektif telah

terbukti meningkatkan efisiensi dalam penanganan masalah yang kompleks dan berdampak tinggi.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam aspek pertukaran sumberdaya. Beberapa di antaranya termasuk kekhawatiran tentang ketidakseimbangan dalam kontribusi sumberdaya dari masing-masing pihak, masalah kepercayaan, atau bahkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan tawaran sumberdaya dari berbagai pemangku kepentingan (Provan & Milward, 2001). Oleh karena itu, manajemen dan koordinasi yang cermat dalam proses pertukaran sumberdaya menjadi esensial untuk mencapai kolaborasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, aspek pertukaran sumberdaya merupakan salah satu pilar kunci dalam teori kolaborasi integratif. Dalam konteks ini, pertukaran sumberdaya yang efektif memungkinkan organisasi atau pemangku kepentingan yang berbeda untuk saling memperkuat dan mengoptimalkan potensi mereka dalam mencapai tujuan bersama (Provan & Kenis, 2008). Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pertukaran sumberdaya, kolaborasi integratif dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat (Emerson & Nabatchi, 2015).

## **2.5. Penelitian Terdahulu**

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

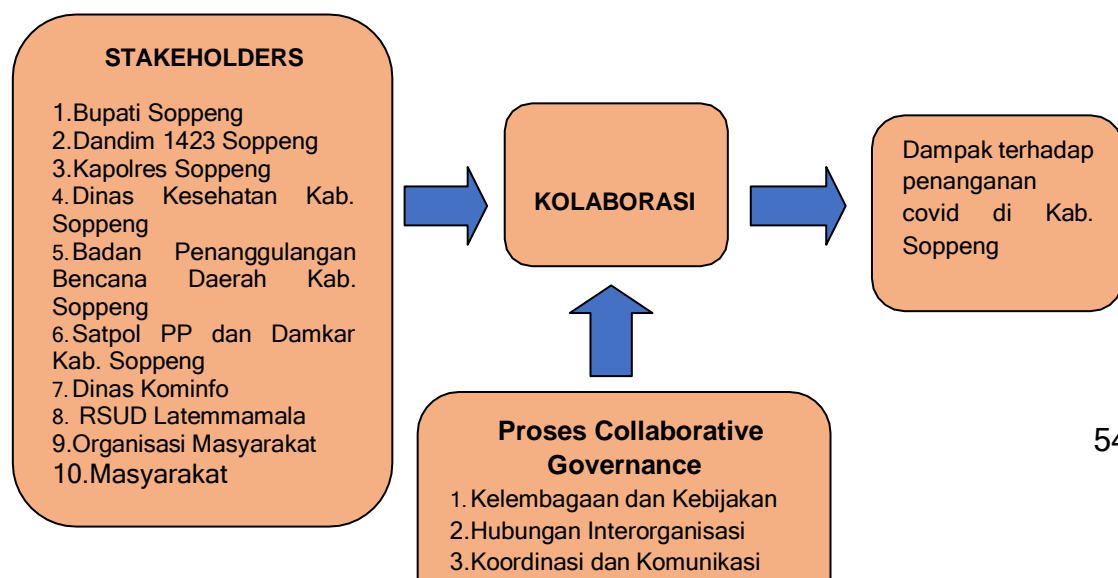
N O	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	Persamaan/perbedaan
1	Asdi Sutriadi Sadar	Kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Hewan di Kota Watampone	Tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Hewan di Kota Watampone Proses kolaborasi dimulai dari pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan pembentukan kapasitas bersama. Setelah tiga hal itu terbentuk dilanjutkan dengan melaksanakan tindakan kolaborasi yang memberikan dampak sementara	Penelitian ini mengkaji tentang kolaborasi pemerintah daerah. Fokus Objek Penelitian Berbeda Lokasi penelitian berbeda
2	Ranggi Ade Febrian	Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	konsep Collaborative Governance sebagai basis pembangunan kawasan perdesaan dinilai akan mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan. Potensi untuk memajukan desa denganmengkolabor asi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak, dapat dimulai dengan melakukan kolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus, dengan melibatkan berbagai stakeholder yang	Penelitian ini mengkaji tentang Collaborative Governance Penelitian ini membahas tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan sedangkan penelitian penulis akan membahas tentang penanggulangan kemiskinan selain itu lokasi penelitian berbeda.

			terkait dengan kepentingan dan potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.	
--	--	--	--	--

## 2.6. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka dapat dirumuskan kerangka pikir penelitian ini. Collaborative Governance dari seluruh Stakeholder dalam menjalankan program penanganan Covid-19 di Kabupaten Soppeng sangat dibutuhkan. Kolaborasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid19 Kabupaten Soppeng dalam penanganan Covid-19. Dengan adanya kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penanganan Covid-19 ini, melalui konsep kolaborasi integrative yang merupakan rumpun kajian Collaborative Governance yang diuraikan oleh Emerson. Keseluruhan upaya kolaborasi yang dilakukan tentunya akan berdampak pada upaya penurunan angka kasus Covid 19 di Kabupaten Soppeng.

**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**



”